



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

සිංහල විද්‍යා සිංහල විද්‍යා සාහසිකයා

Unit I: Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo 55611 Telepon (0274) 774535 Faksimile (0274) 773916

Unit II: Jalan Terbah, Wates, Kulon Progo 55611 Telepon (0274) 774943

Email: pendidikan@kulonprogokab.go.id Website: www.pendidikan.kulonprogokab.go.id

Wates, 2 Juni 2021

Nomor : 800 / 1127

Lamp : -

Sifat : **SANGAT SEGERA**

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan
Pembatasan Sistem Kerja
Pegawai

Kepada :

**Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan Formal
(TK, SD, SMP)**

2. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
(KB/TPA, Lembaga Kursus, PKBM, SKB)
se-Kabupaten Kulon Progo

di TEMPAT

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 800/1785 tanggal 2 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Sistem Kerja Pegawai Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka pelaksanaan system kerja pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo diatur sebagai berikut:

1. Membatasi aktifitas di Satuan Pendidikan dengan menerapkan **Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen)** dan **Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen)**;
2. Menerapkan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan perkantoran dan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - a. Penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
 - b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
 - c. Menjaga jarak antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. Mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*.

- e. Ikut berperan serta dalam sosialisasi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M), *testing tracing treatment* (3T), dan vaksin di warga Satuan Pendidikan;
- f. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit kerja masing-masing;
- g. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- h. **Kegiatan sekolah diatur sesuai Kalender Pendidikan;**
- i. Semua pegawai apabila diperlukan kepentingan dinas, **wajib hadir** di tempat kerja/Satuan Pendidikan;
- j. Sistem kerja pegawai dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid-19* **diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2021** dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan terbaru.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo



ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700514 199603 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Kepala BKPP Kabupaten Kulon Progo.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. **Arsip.**



BUPATI KULON PROGO

Wates, 2 Juni 2021

Kepada:

- Yth.: 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.
3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.
di tempat

SURAT EDARAN

Nomor 800/1785

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBATASAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka pelaksanaan sistem kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ditentukan sebagai berikut:

1. Sistem kerja pegawai dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid-19* **diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2021;**
2. Menerapkan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan perkantoran, meliputi:
 - a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
 - b. mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*; dan
 - e. mengurangi mobilitas.
3. Ikut berperan serta dalam sosialisasi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5M), *testing tracking treatment* (3T), dan vaksin di masyarakat.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦢꦤꦼꦫꦗꦴꦩꦤꦼꦮꦪꦏꦂꦠ

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 14 / INSTR / 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Sleman
3. Bupati Bantul
4. Bupati Kulon Progo
5. Bupati Gunungkidul

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi COVID-19.

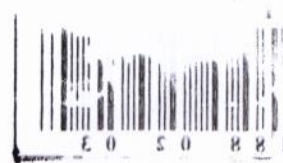
KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:



- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.



- KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kalurahan dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan dibentuk Posko Kemantren/Kapanewon.
- KELIMA : Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan/Kalurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
- KEENAM : Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kemantren/Kapanewon, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.



KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Kalurahan dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Kalurahan dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
- d. kebutuhan penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada APBD DIY dan APBD Kabupaten/Kota; dan
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD DIY/APBD Kabupaten/Kota/APBDes.

KEDELAPAN : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kalurahan dan Mitra Kalurahan lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Kalurahan maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEMBILAN : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work from Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work from Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

- g. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- i. melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

KESEPULUH

: Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:

- a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
- b. mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/hand sanitizer;
- c. menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter); dan
- d. mencegah terjadinya kerumunan yang berponsi menimbulkan penularan COVID-19.

KESEBELAS

: Untuk memperkuat kemampuan *tracking* dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina).

KEDUA BELAS

: Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia).

KETIGA BELAS

: Untuk mengoptimalkan Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten/Kota, Kemantren/Kapanewon maupun Kelurahan/Kalurahan sampai dengan Padukuhan/RW/RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

- KEEMPAT BELAS : Menginstruksikan kepada Kelurahan/Kalurahan membentuk POSKO ditingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga/Linmas dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
- KELIMA BELAS : Menginstruksikan kepada Kelurahan/Kalurahan untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.
- KEENAM BELAS : Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KETUJUH BELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bupati/Walikota:
 1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. agar mengintensifkan penegakan 5M:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T:



- 1) *testing*;
 - 2) *tracking*; dan
 - 3) *treatment*;
3. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/ taman dengan menerapkan kewajiban:
- a) penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*; dan
 - b) penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/ lokasi wisata *outdoor*; dan
 - c) untuk daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah:
 - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 DIY; dan
 - 2) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KESEMBILAN BELAS : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah masing-masing kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku mulai **1 Juni 2021** sampai dengan **14 Juni 2021** dan pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 18 Mei 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **31 MEI 2021**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

